

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA



LAPORAN PEMANTAUAN EVALUASI KINERJA TW I

2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan tingkat kemajuan/progres dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian *reward and punishment*, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi indikator kerjanya masih dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi pemantauan dan penilaian kinerja organisasi berdasarkan peraturan yang ada, maka diperlukan pelaporan secara berkala setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali. Laporan triwulan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh pelaksana program/kegiatan dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura. Diharapkan dengan laporan triwulan ini, semua unit Eselon II sebagai pelaksana kegiatan mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan masing-masing dan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan yang terjadi. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan.

B. Tujuan

1. Memberikan informasi mengenai capaian realisasi keuangan dan fisik program/kegiatan serta satker lingkup Ditjen Hortikultura TA. 2023 s.d. Triwulan I.
2. Melakukan analisa permasalahan dan rekomendasi solusi/perbaikan yang harus dilakukan sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan informasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Hortikultura s.d. Triwulan I.

C. Keluaran

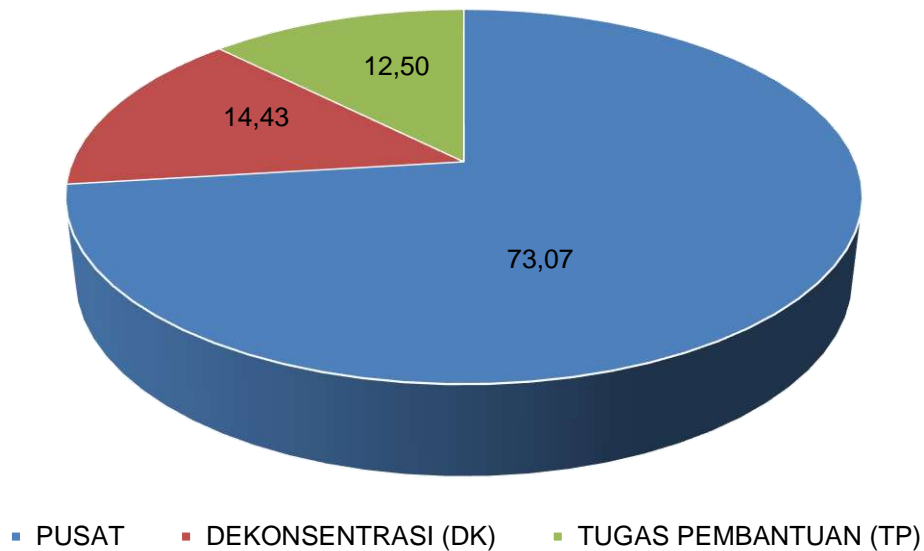
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Triwulan I Tahun 2023 berisi:

1. Capaian kinerja keuangan dan fisik s.d. 31 Maret 2023.
2. Capaian kinerja IKU Triwulan I TA. 2023.
3. Permasalahan dan Tindak Lanjut.

II. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN TRIWULAN I TA. 2023

A. Capaian Realisasi Keuangan Ditjen Hortikultura Per Kewenangan

Alokasi Pagu APBN Ditjen Hortikultura TA. 2023 adalah Rp.1.034.155.508.000,00 yang berdasarkan kewenangannya terbagi menjadi Pagu Pusat sebesar Rp.755.646.408.000,00 (73,07%) dan Pagu Daerah sebesar Rp.278.509.100.000,00 (26,93%) yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi Rp.149.189.100.000,00 (14,43%) dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.129.320.000.000,00 (12,50%). Komposisi Pagu per kewenangan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Komposisi Pagu Ditjen Hortikultura TA. 2023

Adapun realisasi keuangan sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan kewenangan Pusat dan Daerah ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Ditjen Hortikultura Per Kewenangan s.d. 31 Maret 2023

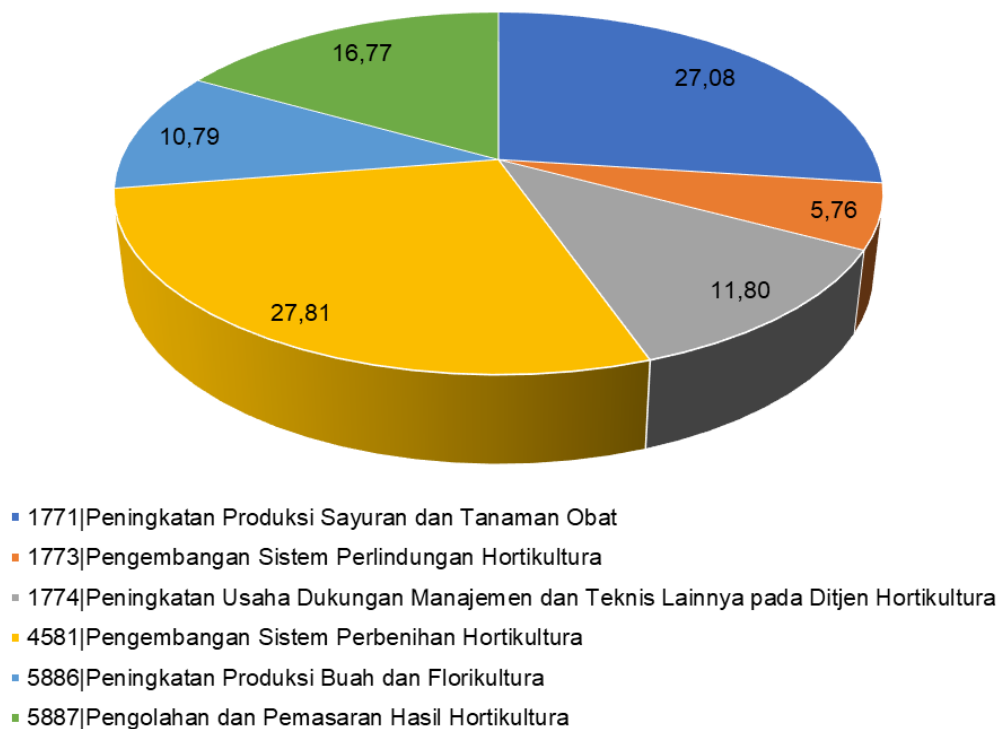
NO	KEWENANGAN	PAGU		REALISASI KEUANGAN (Rp)		Outstanding Kontrak (Rp)
		Rp.	%	SP2D (Rp)	%	
I	PUSAT	755.646.408.000	73,07	35.662.129.037	4,72	38.027.246.484
II	DAERAH	278.509.100.000	26,93	10.304.329.212	3,70	10.933.659.250
1	DEKONSENTRASI (DK)	149.189.100.000	14,43	8.323.208.722	5,58	4.350.776.000
2	TUGAS PEMBANTUAN (TP)	129.320.000.000	12,50	1.981.120.490	1,53	6.582.883.250
	TOTAL	1.034.155.508.000		45.966.458.249	4,44	48.960.905.734

Sumber: OMSPAN (31 Maret 2023) diolah

Berdasarkan Tabel 1 di atas diketahui bahwa realisasi anggaran pada kewenangan Pusat dan Daerah pada triwulan kesatu ini baru mencapai 4,44%, dengan rincian Pusat sebesar 4,72% dan Daerah sebesar 3,70% (Dekonsentrasi sebesar 5,58% dan Tugas Pembantuan sebesar 1,53%). Berdasarkan data realisasi sampai triwulan kesatu tersebut, masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 15%.

B. Capaian Realisasi Keuangan Ditjen Hortikultura Per Kegiatan

Ditjen Hortikultura melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 6 (enam) Kegiatan yaitu: 1). Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan yaitu: Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, Perbenihan Hortikultura, Perlindungan Hortikultura; 2). Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura; 3). Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Hortikultura. Komposisi anggaran Ditjen Hortikultura per Kegiatan TA. 2023 sampai 31 Maret 2023 ditampilkan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Anggaran Ditjen Hortikultura Per Kegiatan TA. 2023

Realisasi keuangan masing-masing kegiatan per tanggal 31 Maret 2023 (berdasarkan aplikasi OMSPAN) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Ditjen Hortikultura Per Kegiatan (Pusat dan Daerah) s.d. 31 Maret 2023

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Outstanding Kontrak (Rp)
			SP2D (Rp)	% Realisasi SP2D	
1	1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	280.029.000.000	3.374.219.837	1,20	31.256.926.481
2	1773 Perlindungan Hortikultura	59.550.000.000	2.193.308.581	3,68	199.300.000
3	1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	122.048.516.000	18.847.484.608	15,44	3.600.545.223
4	4581 Perbenihan Hortikultura	287.584.540.000	17.971.291.762	6,25	11.799.376.000
5	5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	111.535.500.000	1.643.401.853	1,47	1.412.510.000
6	5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	173.407.952.000	1.936.751.608	1,12	692.248.030
JUMLAH		1.034.155.508.000	45.966.458.249	4,44	48.960.905.734

Sumber: OMSPAN (31 Maret 2023) diolah

Berdasarkan Tabel 2 diatas, secara umum realisasi anggaran per Kegiatan Pusat dan Daerah masih sangat kecil, dimana diketahui hanya 1 (satu) kegiatan yang realisasinya telah mencapai $\geq 15\%$, yaitu Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Hortikultura, dan 5 (lima) kegiatan yang realisasinya berkisar 1,12% s.d. 6,25%, yaitu Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, Perbenihan Hortikultura, Perlindungan Hortikultura, dan Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.

C. Capaian Realisasi Keuangan Ditjen Hortikultura Per Klasifikasi Rincian Output

Pada tahun 2023, secara umum Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) masih sama seperti tahun 2022. Data realisasi keuangan per KRO dan RO s.d. Triwulan Kesatu Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Ditjen Hortikultura Per Klasifikasi Rincian Output (KRO) s.d. 31 Maret 2023

No.	KEGIATAN	Nama Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Pagu	Realisasi Keuangan		Outstanding Kontrak (Rp)
				SP2D		
				(Rp.)	(%)	
I	1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		280.029.000.000	3.374.219.837	1,20	31.256.926.481
		1771.AEA Koordinasi	7.500.000.000	843.908.094	11,25	65.500.000
		1771.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.000.000.000	140.503.018	14,05	0
		1771.CAI Sarana Pengembangan Kawasan	100.705.000.000	462.710.917	0,46	0
		1771.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.600.000.000	25.411.100	0,45	0
		1771.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	165.224.000.000	1.901.686.708	1,15	31.191.426.481

No.	KEGIATAN	Nama Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan		Outstanding Kontrak (Rp)	
				SP2D			
				(Rp.)	(%)		
II	4581 Perbenihan Hortikultura		287.584.540.000	17.971.291.762	6,25	11.799.376.000	
		4581.AEA Koordinasi	7.776.500.000	915.504.530	11,77	0	
		4581.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	223.500.000	4.200.000	1,88	0	
		4581.BKB Pemantauan Produk	1.945.115.000	163.508.500	8,41	0	
		4581.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	41.840.000.000	693.628.784	1,66	3.956.000.000	
		4581.CAI Sarana Pengembangan Kawasan	29.522.040.000	1.913.723.788	6,48	183.000.000	
		4581.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.500.000.000	510.479.140	4,86	0	
		4581.PDC Sertifikasi Produk	10.014.885.000	545.128.720	5,44	0	
		4581.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	185.762.500.000	13.225.118.300	7,12	7.660.376.000	
III	1773 Perlindungan Hortikultura		59.550.000.000	2.193.308.581	3,68	199.300.000	
		1773.AEA Koordinasi	8.365.000.000	1.183.660.652	14,15	0	
		1773.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	400.000.000	0	0,00	0	
		1773.BMA Data dan Informasi Publik	300.000.000	0	0,00	0	
		1773.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	5.250.000.000	128.274.500	2,44	0	
		1773.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	45.235.000.000	881.373.429	1,95	199.300.000	
IV	1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura		122.048.516.000	18.847.484.608	15,44	3.600.545.223	
		1774.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.500.000.000	207.192.896	13,81	0	
		1774.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	50.471.606.000	10.850.745.199	21,50	3.201.395.223	
		1774.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.000.000.000	301.277.000	5,02	399.150.000	
		1774.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	25.640.310.000	4.589.326.786	17,90	0	
		1774.FAD Perencanaan dan Penganggaran	38.436.600.000	2.898.942.727	7,54	0	
V	5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura		111.535.500.000	1.643.401.853	1,47	1.412.510.000	
		5886.AEA Koordinasi	7.460.566.000	882.708.276	11,83	0	
		5886.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.047.459.000	306.187.150	29,23	0	
		5886.CAI Sarana Pengembangan Kawasan	66.997.475.000	148.034.535	0,22	325.920.000	
		5886.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.050.000.000	0	0,00	0	
		5886.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	34.980.000.000	306.471.892	0,88	1.086.590.000	
VI	5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura		173.407.952.000	1.936.751.608	1,12	692.248.030	
		5887.ADA Standarisasi Produk	2.500.000.000	99.475.831	3,98	0	
		5887.AEA Koordinasi	9.085.952.000	804.758.129	8,86	0	
		5887.AEH Promosi	14.031.000.000	299.608.943	2,14	266.004.030	
		5887.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	500.000.000	45.084.500	9,02	0	
		5887.BMA Data dan Informasi Publik	2.870.000.000	35.672.750	1,24	0	
		5887.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.146.000.000	20.930.000	0,34	0	
		5887.PDC Sertifikat Produk	6.375.000.000	41.786.556	0,66	0	
		5887.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4.800.000.000	4.000.000	0,08	0	
		5887.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	68.400.000.000	386.297.899	0,56	426.244.000	
		5887.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	5.000.000.000	0	0,00	0	
		5887.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	53.700.000.000	199.137.000	0,37	0	
			Total		1.034.155.508.000	45.966.458.249	4,44

Tabel 4. Realisasi Anggaran Ditjen Hortikultura Per Rincian Output (RO)
s.d. 31 Maret 2023

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	Pagu	Realisasi Keuangan (PERKIRAAN)		Outstanding Kontrak (Rp)
				SP2D		
				(Rp.)	(%)	
I	1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		280.029.000.000	3.374.219.837	1,20	31.256.926.481
		1771.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	7.500.000.000	843.908.094	11,25	65.500.000
		1771.AFA.010 Peraturan/Norma/Pedoman	1.000.000.000	140.503.018	14,05	
		1771.CAI.014 Kawasan Sayuran Lainnya	100.705.000.000	462.710.917	0,46	
		1771.CBK.010 Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat	5.600.000.000	25.411.100	0,45	
		1771.RAI.010 Kawasan Bawang Merah	49.924.000.000	701.926.427	1,41	14.353.579.231
		1771.RAI.011 Kawasan Aneka Cabai	72.000.000.000	1.129.981.087	1,57	16.398.361.000
		1771.RAI.012 Kawasan Tanaman Obat	7.000.000.000	30.763.000	0,44	
		1771.RAI.013 Kawasan Jahe	7.000.000.000	27.518.553	0,39	439.486.250
		1771.RAI.014 Kawasan Bawang Putih	27.200.000.000	9.383.987	0,03	
		1771.RAI.017 Kawasan Kentang	2.100.000.000	2.113.654	0,10	
II	4581 Perbenihan Hortikultura		287.584.540.000	17.971.291.762	6,25	11.799.376.000
		4581.AEA.020 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	7.776.500.000	915.504.530	11,77	
		4581.AFA.021 Peraturan/Norma/Pedoman	223.500.000	4.200.000	1,88	
		4581.BKB.011 Laporan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	1.945.115.000	163.508.500	8,41	
		4581.CAG.013 Benih Sumber Batang Hortikultura	41.840.000.000	693.628.784	1,66	3.956.000.000
		4581.CAI.017 Benih Hortikultura Lainnya	29.522.040.000	1.913.723.788	6,48	183.000.000
		4581.CBK.025 Prasarana Perbenihan Hortikultura	10.500.000.000	510.479.140	4,86	
		4581.PDC.010 Sertifikasi Benih Hortikultura	10.014.885.000	545.128.720	5,44	
		4581.RAI.010 Benih Sebar Umbi /Rimpang Hortikultura	183.977.500.000	13.225.118.300	7,19	7.352.776.000
		4581.RAI.011 Benih Sebar Batang Hortikultura	1.785.000.000	0	0,00	307.600.000
		III	1773 Perlindungan Hortikultura		59.550.000.000	2.193.308.581
1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	8.365.000.000			1.183.660.652	14,15	
1773.AFA.012 Peraturan/Norma/Pedoman	400.000.000			0	0,00	
1773.BMA.010 Informasi Peramalan OPT Hortikultura	300.000.000			0	0,00	
1773.QDD.010 Penerapan PHT	5.250.000.000			128.274.500	2,44	
1773.RAI.010 Area pengendalian OPT Hortikultura	35.235.000.000			368.316.975	1,05	199.300.000
1773.RAI.013 Area Penanganan DPI Hortikultura	10.000.000.000			513.056.454	5,13	

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	Pagu	Realisasi Keuangan (PERKIRAAN)		Outstanding Kontrak (Rp)
				SP2D		
				(Rp.)	(Rp.)	
IV	1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura		122.048.516.000	18.847.484.608	15,44	3.600.545.223
	1774.ABR.010 Layanan Rekomendasi Hortikultura		1.500.000.000	207.192.896	13,81	
	1774.EBA.956 Layanan BMN		1.000.000.000	99.917.069	9,99	
	1774.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat		2.500.000.000	96.444.424	3,86	
	1774.EBA.962 Layanan Umum		3.000.000.000	357.099.020	11,90	
	1774.EBA.963 Layanan Data dan Informasi		2.000.000.000	429.880.147	21,49	
	1774.EBA.994 Layanan Perkantoran		41.971.606.000	9.867.404.539	23,51	3.201.395.223
	1774.EBB.951 Layanan Sarana Internal		4.000.000.000	301.277.000	7,53	399.150.000
	1774.EBB.971 Layanan Prasarana Internal		2.000.000.000	0	0,00	
	1774.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran		8.140.310.000	1.418.275.767	17,42	
	1774.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi		2.000.000.000	231.256.088	11,56	
	1774.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan		15.500.000.000	2.939.794.931	18,97	
	1774.FAD.012 Layanan Perencanaan Satker Daerah		6.460.375.000	500.415.113	7,75	
	1774.FAD.013 Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah		31.976.225.000	2.398.527.614	7,50	
V	5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura		111.535.500.000	1.643.401.853	1,47	1.412.510.000
	5886.AEA.021 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan		7.460.566.000	882.708.276	11,83	
	5886.AFA.022 Peraturan/Norma/Pedoman		1.047.459.000	306.187.150	29,23	
	5886.CAI.010 Kawasan Pisang		20.750.000.000	0	0,00	
	5886.CAI.016 Kawasan Jeruk		4.300.500.000	69.995.230	1,63	325.920.000
	5886.CAI.017 Kawasan Buah Lain		36.776.975.000	65.355.305	0,18	
	5886.CAI.019 Kawasan Florikultura Lain		5.170.000.000	12.684.000	0,25	
	5886.CBK.010 Prasarana Budidaya Buah dan Florikultura		1.050.000.000	0	0,00	
	5886.RAI.012 Kawasan Durian		5.850.000.000	133.912.046	2,29	96.480.000
	5886.RAI.013 Kawasan Mangga		3.250.000.000	9.600.000	0,30	
	5886.RAI.014 Kawasan Kelengkeng		8.550.000.000	74.952.650	0,88	314.150.000
	5886.RAI.015 Kawasan Alpukat		5.850.000.000	47.216.402	0,81	257.500.000
	5886.RAI.016 Kawasan Manggis		4.550.000.000	40.790.795	0,90	418.460.000
	5886.RAI.018 Kawasan Krisan		3.780.000.000	0	0,00	
	5886.RAI.019 Kawasan Anggrek		3.150.000.000	0	0,00	
VI	5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura		173.407.952.000	1.936.751.608	1,12	692.248.030
	5887.ADA.010 Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura		2.500.000.000	99.475.831	3,98	
	5887.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan		9.085.952.000	804.758.129	8,86	
	5887.AEH.020 Promosi Produk Hortikultura		14.031.000.000	299.608.943	2,14	266.004.030
	5887.AFA.021 Peraturan/Norma/Pedoman		500.000.000	45.084.500	9,02	
	5887.BMA.030 Informasi Pasar Komoditas Hortikultura		2.870.000.000	35.672.750	1,24	
	5887.CAG.010 Sarana Pemasaran		6.146.000.000	20.930.000	0,34	
	5887.PDC.010 Sertifikasi Produk Hortikultura		6.375.000.000	41.786.556	0,66	
	5887.QDD.021 Penerapan GAP		3.300.000.000	4.000.000	0,12	
	5887.QDD.022 Penerapan GHP		1.500.000.000	0	0,00	
	5887.RAG.010 Sarana Pascapanen Hortikultura		45.300.000.000	297.998.745	0,66	426.244.000
	5887.RAG.011 Sarana Pengolahan Hortikultura		23.100.000.000	88.299.154	0,38	
	5887.RAI.010 Horticulture Development of Dryland Areas Project		5.000.000.000	0	0,00	
	5887.RBK.010 Prasarana Pascapanen Hortikultura		50.400.000.000	199.137.000	0,40	
	5887.RBK.011 Prasarana Pengolahan Hortikultura		3.300.000.000	0	0,00	
Total			1.034.155.508.000	45.966.458.249	4,44	48.960.905.734

D. Capaian Realisasi Keuangan Per Satker Lingkup Ditjen Hortikultura

1. Satker Dekonsentrasi

Terdapat 34 Satker Dekonsentrasi yang mendapat alokasi APBN Hortikultura TA. 2023 dengan total anggaran Rp.149.189.100.000,00 dengan realisasi Satker Dekonsentrasi sampai dengan 31 Maret 2023 sebesar Rp.8.323.208.722,00 (5,58%) dengan nilai outstanding kontrak sebesar Rp.4.350.776.000,00. Dari 34 Satker Dekonsentrasi, 3 (tiga) Satker telah mencapai target realisasi > 15%, 4 (empat) Satker realisasi antara 7-14%, 3 (tiga) Satker realisasi baru mencapai kisaran 5%, dan selebihnya Satker realisasinya masih < 5%. Ranking Realisasi Satker Dekonsentrasi ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Ranking Realisasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Lingkup Ditjen Hortikultura s.d. 31 Maret 2023

No	Kode Nama Satker	Pagu (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Outstanding Kontrak (Rp)
			Realisasi SP2D (Rp)	% Realisasi SP2D	
1	109005 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	4.052.706.000	1.874.922.600	46,26	-
2	129000 DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	6.122.100.000	2.528.802.580	41,31	-
3	239009 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	4.280.471.000	685.775.250	16,02	-
4	269000 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	1.696.290.000	237.524.000	14,00	-
5	289034 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	2.565.296.000	283.500.000	11,05	-
6	417673 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	828.936.000	78.893.684	9,52	-
7	319002 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	2.689.384.000	211.082.800	7,85	-
8	249030 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	5.016.367.000	283.693.441	5,66	201.376.000
9	229027 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	3.666.328.000	195.296.572	5,33	-
10	119000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	4.601.468.000	238.335.300	5,18	-
11	339156 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	1.991.358.000	94.500.000	4,75	-
12	209065 DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	3.957.157.000	185.513.000	4,69	-
13	189016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	3.289.072.000	146.550.000	4,46	-
14	099033 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	4.457.871.000	188.709.056	4,23	-
15	309032 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.860.364.000	73.005.750	3,92	-
16	179021 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	3.205.364.000	93.300.000	2,91	-
17	039012 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	12.921.833.000	292.417.400	2,26	1.806.000.000
18	029027 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	10.043.503.000	203.799.921	2,03	-
19	199026 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	7.423.932.000	126.994.980	1,71	-
20	089009 DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	6.469.102.000	63.455.438	0,98	1.500.500.000
21	079025 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	10.789.986.000	104.093.750	0,96	-
22	340056 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	2.992.968.000	28.713.200	0,96	-
23	069077 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	5.906.568.000	36.716.000	0,62	-
24	139030 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	4.115.013.000	22.614.000	0,55	-
25	059000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	9.344.299.000	45.000.000	0,48	-
26	159000 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	4.293.025.000	-	-	709.500.000
27	169025 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3.088.671.000	-	-	133.400.000
28	019031 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	934.918.000	-	-	-
29	329026 DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.557.283.000	-	-	-
30	219000 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	2.254.142.000	-	-	-
31	259018 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	2.526.928.000	-	-	-
32	299005 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	2.827.382.000	-	-	-
33	149000 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2.964.265.000	-	-	-
34	049025 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	4.454.750.000	-	-	-
	JUMLAH	149.189.100.000	8.323.208.722	5,58	4.350.776.000

Sumber: OMSPAN (31 Maret 2023) diolah

2. Satker Tugas Pembantuan

Terdapat 39 Satker Tugas Pembantuan yang terdiri dari 31 Satker Tugas Pembantuan Provinsi dan 8 (delapan) Satker Tugas Pembantuan Kabupaten (TP Mandiri) dengan total anggaran Rp.129.320.000.000,00, dengan realisasi Satker Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Hortikultura TA. 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 baru mencapai sebesar Rp.1.981.120.490,00 (1,53%) dengan nilai outstanding kontrak sebesar Rp.6.582.883.250,00. Dari 39 Satker Tugas Pembantuan, realisasi Triwulan Kesatu paling tinggi baru mencapai 8,36%, yaitu Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kepahiang. Ranking Realisasi Satker Tugas Pembantuan ditampilkan pada pada Tabel 6.

Tabel 6. Ranking Realisasi Anggaran Satker Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Hortikultura s.d. 31 Maret 2023

No	Kode Nama Satker	Pagu (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Outstanding Kontrak (Rp)
			Realisasi SP2D (Rp)	% Realisasi SP2D	
1	269057 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KAB KEPAHIANG	1.435.000.000	120.000.000	8,36	-
2	280151 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	2.750.000.000	129.700.000	4,72	-
3	129113 DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	4.907.500.000	206.215.328	4,20	1.506.000.000
4	109905 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	2.806.000.000	112.951.418	4,03	1.088.774.000
5	219091 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	2.870.000.000	103.650.000	3,61	399.592.000
6	099315 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	3.415.000.000	121.587.700	3,56	1.103.380.000
7	319089 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	3.365.000.000	92.212.000	2,74	-
8	340142 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	3.125.000.000	83.987.200	2,69	-
9	119130 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	4.471.000.000	111.627.009	2,50	-
10	309901 DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.250.500.000	26.650.000	2,13	216.140.000
11	249159 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	5.092.500.000	104.698.850	2,06	897.302.000
12	039152 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	6.085.000.000	105.119.000	1,73	165.105.000
13	189916 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.915.000.000	49.570.000	1,70	-
14	199126 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	6.709.500.000	99.671.900	1,49	-
15	229100 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	2.895.000.000	39.194.092	1,35	-
16	239127 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3.715.000.000	49.741.500	1,34	-
17	417674 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.960.000.000	25.319.000	1,29	-
18	159108 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	4.014.000.000	48.688.986	1,21	-
19	169113 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	4.600.000.000	49.001.000	1,07	-
20	229049 DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN	939.000.000	10.000.000	1,06	-
21	079125 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	6.401.000.000	67.595.000	1,06	-
22	089131 DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	5.821.000.000	49.800.000	0,86	1.031.176.250
23	059179 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	7.545.000.000	59.010.000	0,78	175.414.000
24	029160 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	6.500.000.000	50.552.507	0,78	-
25	179104 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	2.095.000.000	16.000.000	0,76	-
26	069133 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	3.763.000.000	19.220.000	0,51	-
27	209108 DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	4.170.000.000	20.000.000	0,48	-
28	139126 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	5.135.000.000	9.358.000	0,18	-
29	320088 DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	310.000.000	-	-	-
30	419022 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINJAI	595.000.000	-	-	-
31	199092 DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG	945.000.000	-	-	-
32	192135 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ENREKANG	1.110.000.000	-	-	-
33	030649 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BATANG	1.320.000.000	-	-	-
34	059056 DINAS KEHUTANAN PERTANIAN DAN URUSAN KETAHANAN PANGAN KAB. BANYUWANGI	1.375.000.000	-	-	-
35	259098 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	1.980.000.000	-	-	-
36	299381 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	2.395.000.000	-	-	-
37	029036 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. CIANJUR	2.715.000.000	-	-	-
38	049088 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	2.840.000.000	-	-	-
39	149115 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2.985.000.000	-	-	-
	JUMLAH	129.320.000.000	1.981.120.490	1,53	6.582.883.250

Sumber: OMSPAN (31 Maret 2023) diolah

3. Satker Ditjen Hortikultura (Satker Pusat)

Sampai dengan 31 Maret 2023, realisasi Satker Ditjen Hortikultura (Satker Pusat) baru mencapai Rp.35.662.129.037,00 (4,72%) dengan outstanding kontrak sebesar Rp.38.027.246.484,00. Realisasi tertinggi dicapai pada Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura (18,85%), sedangkan kegiatan yang realisasinya paling rendah adalah Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat (1,13%). Realisasi Satker Ditjen Hortikultura (Satker Pusat) Per Kegiatan s.d. 31 Maret 2023 ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Realisasi Satker Ditjen Hortikultura (Satker Pusat) Per Kegiatan s.d. 31 Maret 2023

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Outstanding Kontrak (Rp)
			SP2D (Rp)	% Realisasi SP2D	
1	1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	239.968.500.000	2.705.880.056	1,13	26.445.897.231
2	1773 Perlindungan Hortikultura	17.850.000.000	1.183.660.652	6,63	199.300.000
3	1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	84.611.916.000	15.948.541.881	18,85	3.600.545.223
4	4581 Perbenihan Hortikultura	216.697.040.000	12.962.422.585	5,98	7.448.600.000
5	5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	84.941.000.000	1.299.007.923	1,53	-
6	5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	111.577.952.000	1.562.615.940	1,40	332.904.030
	JUMLAH	755.646.408.000	35.662.129.037	4,72	38.027.246.484

Sumber: OMSPAN (31 Maret 2023) diolah

III. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN I TA. 2023

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang dilaporkan ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2023 untuk mencapai 7 (tujuh) Sasaran Program yaitu: 1). Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri; 2). Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan; 3). Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas; 4). Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian; 5). Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian; 6). Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, Dan Berorientasi Pada Layanan Prima; 7). Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura pada Triwulan I selengkapnya disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Ditjen Hortikultura s.d. Triwulan 1

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1.1	Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis (%)	1,93	-74,17	Data baru s.d. 2 Mei 2023, sehingga belum bisa dibandingkan dengan target, karena baru dapat dihitung setelah sampai 1 tahun/ periode.
		1.2	Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan (%)	3,88	-78,97	Data baru s.d. 2 Mei 2023, sehingga belum bisa dibandingkan dengan target, karena baru dapat dihitung setelah sampai 1 tahun/ periode.

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
2.	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan	2.1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura (%)	92,5	-	Belum dilakukan pengukuran, survei baru akan dilakukan di akhir tahun anggaran.
3.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas	3.1	Rasio Serangan OPT yang Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura (%)	95	99,38	Data sampai 31 Maret 2023.
		3.2	Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI (%)	50	81,65	Data sampai 31 Maret 2023.
4.	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	4.1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura (%)	85	-	Belum dilakukan pengukuran, survei baru akan dilakukan di akhir tahun anggaran.
5.	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5.1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Hortikultura (%)	3	-72,75	Data baru s.d. 31 Maret 2023, sehingga belum bisa dibandingkan dengan target, karena baru dapat dihitung setelah sampai 1 tahun/ periode.

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
6.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, Dan Berorientasi Pada Layanan Prima	6.1	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura (Nilai)	32,07	-	Belum dilakukan penilaian.
7.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	7.1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura (Nilai)	82	12,68	Nilai sementara, sehingga belum bisa dibandingkan dengan target, baru dilakukan penilaian di akhir tahun anggaran.

Sumber: Ditjen Hortikultura diolah

Pada umumnya pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan di akhir tahun anggaran, yaitu pada saat penyusunan Laporan Kinerja (Lakin), hal ini dikarenakan target kinerja yang ada merupakan target kinerja untuk 1 (satu) tahun anggaran. Sehingga menyebabkan beberapa indikator kinerja belum tersedia datanya atau belum bisa dilakukan pengukuran, seperti indikator kinerja peningkatan produksi hortikultura strategis dan peningkatan produksi hortikultura unggulan dimana nilainya masih negatif. Hal ini dikarenakan data produksi dari SPH *online* masih dalam proses (data belum seluruhnya masuk), penyebabnya adalah di lapangan pertanaman belum semua menghasilkan dan tertanam, sehingga perhitungan capaian indikator kinerja menjadi kurang akurat dan menyebabkan angka negatif.

Untuk indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana produksi dan tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan belum tersedia datanya, karena fasilitasi bantuan baik sarana produksi dan sarana pasca panen/pengolahan belum seluruhnya tersalurkan dan dimanfaatkan, sehingga survei baru dapat dilakukan di akhir tahun anggaran. Lebih lanjut, hal ini juga berlaku dalam pengukuran kinerja nilai PMRB dan nilai kinerja anggaran (NKA), dimana penilaian baru dilakukan di semester dua dan akhir tahun anggaran.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator kinerja yang telah mencapai targetnya, seperti indikator kinerja rasio serangan OPT yang ditangani dan rasio luas area yang mendapat penanganan DPI.

Selanjutnya, untuk mengetahui kinerja capaian produksi hortikultura strategis, jika dibandingkan capaian per triwulannya antara periode Triwulan I 2023 dengan periode Triwulan I 2022, dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Produksi Hortikultura Komoditas Strategis Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2022

No.	Komoditas	Produksi (Ton)	
		TW I 2023	TW I 2022
1	Bawang Merah	543.685,80	450.253,69
2	Bawang Putih	6.782,53	7.236,06
3	Cabai Besar	370.565,26	386.206,01
4	Cabai Rawit	379.137,99	371.816,59
Total		1.300.171,58	1.215.512,35

Sumber: SPH *Online* (2 Mei 2023) diolah

Berdasarkan data pada tabel 9 di atas, terlihat bahwa total produksi komoditas strategis pada triwulan satu (TW I) tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan total produksi komoditas strategis pada triwulan satu (TW I) tahun 2022. Dimana secara rinci untuk pencapaian produksi bawang merah dan cabai rawit masih lebih tinggi di TW I tahun 2023 dibandingkan TW I tahun 2022, sebaliknya untuk produksi bawang putih dan cabai besar pencapaian produksi di TW I tahun 2023 sedikit lebih rendah dibandingkan TW I tahun 2022.

IV. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang masih terjadi pada triwulan I antara lain:

1. Adanya *Automatic Adjustment* dan perubahan anggaran hasil kesepakatan dengan Komisi IV DPR-RI sehingga dilakukan revisi DIPA. Sampai triwulan kesatu, sudah mengalami 3 (tiga) kali revisi DIPA.
2. Adanya penambahan Satuan Kerja Tugas Pembantuan (Satker TP) Kabupaten sebanyak 8 (delapan) Kabupaten.
3. Akibat adanya Revisi DIPA, karena penambahan Satker menyebabkan keterlambatan SK Pengelola Satker di Dinas Pertanian.
4. Masih belum lengkapnya daftar usulan CPCL, khususnya yang disebabkan karena adanya perubahan alokasi anggaran atau Revisi DIPA.
5. Proses pengadaan barang (benih dan saprodi), sebagian masih dalam proses penyusunan SK dan sudah ada yang dalam proses kontrak.

B. Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Pertanian dan Tenaga Ahli (TA) Komisi IV DPR RI untuk mempercepat penyampaian usulan CPCL dan segera melengkapi CPCL yang belum ada/lengkap.
2. Pendampingan dan pengawalan pelaksanaan kegiatan di daerah melalui *whatsapp grup* dan *zoom meeting*.
3. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang khususnya melalui e-katalog.
4. Percepatan kegiatan Bimtek dengan melakukan koordinasi kepada Tenaga Ahli (TA) Komisi IV DPR RI.

V. PENUTUP

Laporan Triwulan I Direktorat Jenderal Hortikultura ini merupakan perwujudan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Berbagai upaya telah dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya sasaran dan target kinerja hortikultura pada triwulan I. Direktorat Jenderal Hortikultura sampai Triwulan I ini, dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja yang ada, 2 (dua) diantaranya telah mencapai targetnya, yaitu indikator kinerja rasio serangan OPT yang ditangani dan indikator kinerja rasio luas area yang mendapat penanganan DPI. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan, baik di pusat dan daerah. Oleh karena itu, kerja sama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi menjadi kunci agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional, dan kesejahteraan petani hortikultura.



DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA



LAPORAN PEMANTAUAN 2023 EVALUASI KINERJA TW II

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan tingkat kemajuan/progres dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian *reward and punishment*, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi indikator kerjanya masih dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi pemantauan dan penilaian kinerja organisasi berdasarkan peraturan yang ada, maka diperlukan pelaporan secara berkala setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali. Laporan triwulan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh pelaksana program/kegiatan dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura. Diharapkan dengan laporan triwulan ini, semua unit Eselon II sebagai pelaksana kegiatan mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan masing-masing dan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan yang terjadi. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan.

B. Tujuan

1. Memberikan informasi mengenai capaian realisasi keuangan dan fisik program/kegiatan serta satker lingkup Ditjen Hortikultura TA. 2023 s.d. Triwulan II.
2. Melakukan analisa permasalahan dan rekomendasi solusi/perbaikan yang harus dilakukan sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan informasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Hortikultura s.d. Triwulan II.

C. Keluaran

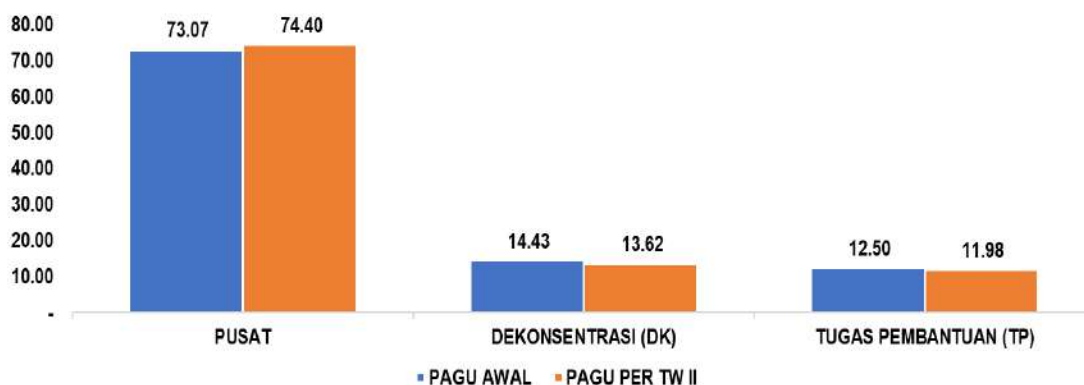
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Triwulan II Tahun 2023 berisi:

1. Capaian kinerja keuangan dan fisik s.d. 30 Juni 2023.
2. Capaian kinerja IKU Triwulan II TA. 2023.
3. Permasalahan dan Tindak Lanjut.

II. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN TRIWULAN II TA. 2023

A. Capaian Realisasi Keuangan Ditjen Hortikultura Per Kewenangan

Alokasi Pagu APBN Ditjen Hortikultura TA. 2023 pertama kali adalah Rp.1.034.155.508.000,00 yang berdasarkan kewenangannya terbagi menjadi Pagu Pusat sebesar Rp.755.646.408.000,00 (73,07%) dan Pagu Daerah sebesar Rp.278.509.100.000,00 (26,93%), yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi Rp.149.189.100.000,00 (14,43%) dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.129.320.000.000,00 (12,50%). Namun demikian, sekitar bulan April 2023 Pagu APBN Ditjen Hortikultura TA. 2023 mengalami perubahan, menjadi sebesar Rp.1.004.155.508.000,00. Berdasarkan kewenangannya terbagi menjadi Pagu Pusat sebesar Rp.747.079.533.000,00 (74,40%) dan Pagu Daerah sebesar Rp.257.075.975.000,00 (25,60%), yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi Rp.136.745.101.000,00 (13,62%) dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.120.330.874.000,00 (11,98%). Komposisi Pagu per kewenangan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Komposisi Pagu Ditjen Hortikultura TA. 2023 s.d. Triwulan II

Adapun realisasi keuangan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 berdasarkan kewenangan Pusat dan Daerah ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Ditjen Hortikultura Per Kewenangan s.d. 30 Juni 2023

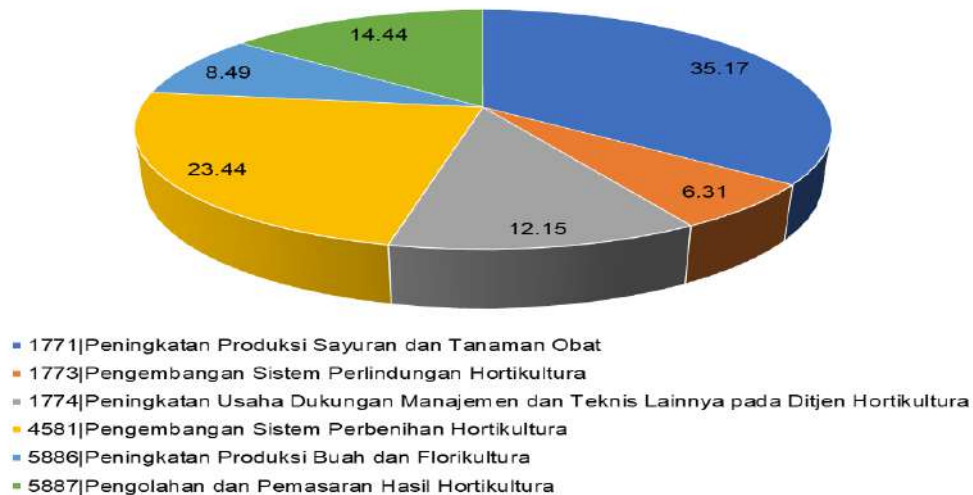
NO	KEWENANGAN	PAGU		REALISASI KEUANGAN (Rp)		Outstanding Kontrak (Rp)
		Rp.	%	SP2D (Rp)	%	
I	PUSAT	747,079,533,000	74.40	147,827,729,854	19.79	57,058,006,611
II	DAERAH	257,075,975,000	25.60	71,172,032,786	27.69	34,397,974,157
1	DEKONSENTRASI (DK)	136,745,101,000	13.62	39,805,636,373	29.11	13,816,062,755
2	TUGAS PEMBANTUAN (TP)	120,330,874,000	11.98	31,366,396,413	26.07	20,581,911,402
	TOTAL	1,004,155,508,000		218,999,762,640	21.81	91,455,980,768

Sumber: OMSPAN (30 Juni 2023) diolah

Berdasarkan Tabel 1 di atas diketahui bahwa realisasi anggaran pada kewenangan Pusat dan Daerah pada triwulan kedua ini baru mencapai 21,81%, dengan rincian Pusat sebesar 19,79% dan Daerah sebesar 27,69% (Dekonsentrasi sebesar 29,11% dan Tugas Pembantuan sebesar 26,07%). Berdasarkan data realisasi sampai triwulan kedua tersebut, masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 40%.

B. Capaian Realisasi Keuangan Ditjen Hortikultura Per Kegiatan

Ditjen Hortikultura melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 6 (enam) Kegiatan yaitu: 1). Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan yaitu: Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, Perbenihan Hortikultura, Perlindungan Hortikultura; 2). Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura; 3). Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Hortikultura. Komposisi anggaran Ditjen Hortikultura per Kegiatan TA. 2023 sampai 30 Juni 2023 ditampilkan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Anggaran Ditjen Hortikultura Per Kegiatan TA. 2023

Realisasi keuangan masing-masing kegiatan per tanggal 30 Juni 2023 (berdasarkan aplikasi OMSPAN) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Ditjen Hortikultura Per Kegiatan (Pusat dan Daerah) s.d. 30 Juni 2023

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Outstanding Kontrak (Rp)
			SP2D (Rp)	% Realisasi SP2D	
1	1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	353,189,537,000	65,211,960,961	18.46	41,097,231,050
2	1773 Perlindungan Hortikultura	63,375,391,000	12,734,793,749	20.09	2,609,082,730
3	1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	122,048,516,000	49,499,559,538	40.56	2,879,790,018
4	4581 Perbenihan Hortikultura	235,325,420,000	50,664,983,570	21.53	20,406,438,825
5	5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	85,211,444,000	20,743,999,728	24.34	10,103,927,651
6	5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	145,005,200,000	20,144,465,094	13.89	14,359,510,494
	JUMLAH	1,004,155,508,000	218,999,762,640	21.81	91,455,980,768

Sumber: OMSPAN (30 Juni 2023) diolah

Berdasarkan Tabel 2 diatas, secara umum realisasi anggaran per Kegiatan Pusat dan Daerah masih jauh dari target, hanya 1 (satu) kegiatan yang realisasinya telah mencapai 40%, yaitu Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Hortikultura, dan 5 (lima) kegiatan yang realisasinya berkisar 13,89% s.d. 24,34%, yaitu Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, Perbenihan Hortikultura, Perlindungan Hortikultura, dan Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.

C. Capaian Realisasi Keuangan Ditjen Hortikultura Per Klasifikasi Rincian Output

Data realisasi keuangan per KRO dan RO s.d. Triwulan Kedua Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Ditjen Hortikultura Per Klasifikasi Rincian Output (KRO) s.d. 30 Juni 2023

No.	KEGIATAN	Nama Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Posisi 30 Juni 2023			Outstanding Kontrak (Rp.)
			Pagu	Realisasi Keuangan		
				SP2D		
(Rp.)	(Rp.)	(%)				
I	1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		353.189.537.000	65.211.960.961	18,46	41.097.231.050
		1771.AEA Koordinasi	5.494.137.000	4.488.234.813	81,69	45.850.000
		1771.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	400.000.000	141.533.018	35,38	0
		1771.CAI Sarana Pengembangan Kawasan	96.206.400.000	13.367.690.501	13,89	836.900.000
		1771.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.535.000.000	2.707.239.300	8,87	0
		1771.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	220.554.000.000	44.507.263.329	20,18	40.214.481.050
II	4581 Perbenihan Hortikultura		235.325.420.000	50.664.983.570	21,53	20.406.438.825
		4581.AEA Koordinasi	7.332.986.000	2.551.330.162	34,79	0
		4581.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	223.500.000	63.315.770	28,33	0
		4581.BKB Pemantauan Produk	1.945.115.000	735.008.820	37,79	0
		4581.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.339.520.000	6.134.309.193	31,72	2.027.168.825
		4581.CAI Sarana Pengembangan Kawasan	28.080.550.000	4.552.159.550	16,21	284.900.000
		4581.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.500.000.000	598.469.580	5,70	0
		4581.PDC Sertifikasi Produk	10.014.870.000	2.942.150.658	29,38	0
		4581.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	157.888.879.000	33.088.239.837	20,96	18.094.370.000

No.	KEGIATAN	Nama Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Posisi 30 Juni 2023			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Outstanding Kontrak (Rp.)
				(Rp.)	(Rp.)	
III	1773 Perlindungan Hortikultura		63.375.391.000	12.734.793.749	20,09	2.609.082.730
		1773.AEA Koordinasi	7.804.250.000	3.076.406.602	39,42	0
		1773.BMA Data dan Informasi Publik	300.000.000	0	0,00	0
		1773.QDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	5.250.000.000	1.068.138.650	20,35	0
		1773.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	50.021.141.000	8.590.248.497	17,17	2.609.082.730
IV	1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura		122.048.516.000	49.499.559.538	40,56	2.879.790.018
		1774.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.500.000.000	395.889.896	26,39	0
		1774.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	50.471.606.000	25.242.325.663	50,01	2.098.774.182
		1774.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.000.000.000	1.028.132.500	17,14	781.015.836
		1774.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	26.640.310.000	9.199.377.514	34,53	0
		1774.FAD Perencanaan dan Penganggaran	37.436.600.000	13.633.833.965	36,42	0
V	5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura		85.211.444.000	20.743.999.728	24,34	10.103.927.651
		5886.AEA Koordinasi	7.460.566.000	2.967.848.477	39,78	0
		5886.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.047.459.000	512.013.558	48,88	0
		5886.CAI Sarana Pengembangan Kawasan	40.883.419.000	3.109.276.366	7,61	2.077.683.670
		5886.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.050.000.000	705.750.000	67,21	0
		5886.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	34.770.000.000	13.449.111.327	38,68	8.026.243.981
VI	5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura		145.005.200.000	20.144.465.094	13,89	14.359.510.494
		5887.ADA Standarisasi Produk	2.026.085.000	319.647.955	15,78	0
		5887.AEA Koordinasi	7.773.843.000	2.951.069.786	37,96	0
		5887.AEH Promosi	12.746.706.000	1.042.045.592	8,18	46.830.000
		5887.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	331.607.000	50.034.500	15,09	0
		5887.BMA Data dan Informasi Publik	2.870.000.000	540.986.342	18,85	0
		5887.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.480.319.000	244.717.790	5,46	0
		5887.PDC Sertifikat Produk	1.980.216.000	728.292.312	36,78	0
		5887.QDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3.083.725.000	435.846.000	14,13	0
		5887.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	62.795.397.000	2.853.371.108	4,54	12.104.570.494
		5887.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	5.000.000.000	0	0,00	0
		5887.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	41.917.302.000	10.978.453.709	26,19	2.208.110.000
		Total			1.004.155.508.000	218.999.762.640

Sumber: OMSPAN (30 Juni 2023) diolah

Tabel 4. Realisasi Anggaran Ditjen Hortikultura Per Rincian Output (RO)
s.d. 30 Juni 2023

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	Posisi 30 Juni 2023			Outstanding Kontrak (Rp)
			Pagu	Realisasi Keuangan		
				SP2D		
(Rp.)	(Rp.)	(%)				
I	1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		353.189.537.000	65.211.960.961	18,46	41.097.231.050
		1771.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	5.494.137.000	4.488.234.813	81,69	45.850.000
		1771.AFA.010 Peraturan/Norma/Pedoman	400.000.000	141.533.018	35,38	
		1771.CAI.014 Kawasan Sayuran Lainnya	96.206.400.000	13.367.690.501	13,89	836.900.000
		1771.CBK.010 Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat	30.535.000.000	2.707.239.300	8,87	
		1771.RAI.010 Kawasan Bawang Merah	111.049.000.000	16.639.954.137	14,98	10.498.443.490
		1771.RAI.011 Kawasan Aneka Cabai	83.930.000.000	25.491.192.493	30,37	19.478.444.110
		1771.RAI.012 Kawasan Tanaman Obat	5.500.000.000	332.811.120	6,05	3.464.985.400
		1771.RAI.013 Kawasan Jahe	5.500.000.000	971.166.335	17,66	2.791.531.250
		1771.RAI.014 Kawasan Bawang Putih	12.625.000.000	965.035.232	7,64	2.860.716.800
		1771.RAI.017 Kawasan Kentang	1.950.000.000	107.104.012	5,49	1.120.360.000
II	4581 Perbenihan Hortikultura		235.325.420.000	50.664.983.570	21,53	20.406.438.825
		4581.AEA.020 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	7.332.986.000	2.551.330.162	34,79	
		4581.AFA.021 Peraturan/Norma/Pedoman	223.500.000	63.315.770	28,33	
		4581.BKB.011 Laporan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	1.945.115.000	735.008.820	37,79	
		4581.CAG.013 Benih Sumber Batang Hortikultura	19.339.520.000	6.134.309.193	31,72	2.027.168.825
		4581.CAI.017 Benih Hortikultura Lainnya	28.080.550.000	4.552.159.550	16,21	284.900.000
		4581.CBK.025 Prasarana Perbenihan Hortikultura	10.500.000.000	598.469.580	5,70	
		4581.PDC.010 Sertifikasi Benih Hortikultura	10.014.870.000	2.942.150.658	29,38	
		4581.RAI.010 Benih Sebar Umbi /RImpang Hortikultura	156.103.879.000	32.522.767.534	20,83	18.094.370.000
		4581.RAI.011 Benih Sebar Batang Hortikultura	1.785.000.000	565.472.303	31,68	
III	1773 Perlindungan Hortikultura		63.375.391.000	12.734.793.749	20,09	2.609.082.730
		1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	7.804.250.000	3.076.406.602	39,42	
		1773.BMA.010 Informasi Peramalan OPT Hortikultura	300.000.000	0	0,00	
		1773.QDD.010 Penerapan PHT	5.250.000.000	1.068.138.650	20,35	
		1773.RAI.010 Area pengendalian OPT Hortikultura	40.157.435.000	6.627.195.560	16,50	1.241.601.698
		1773.RAI.013 Area Penanganan DPI Hortikultura	9.863.706.000	1.963.052.937	19,90	1.367.481.032

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	Posisi 30 Juni 2023			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Outstanding Kontrak (Rp)
				(Rp.)	(Rp.)	
IV	1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura		122.048.516.000	49.499.559.538	40,56	2.879.790.018
		1774.ABR.010 Layanan Rekomendasi Hortikultura	1.500.000.000	395.889.896	26,39	
		1774.EBA.956 Layanan BMN	1.000.000.000	409.696.904	40,97	
		1774.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	2.500.000.000	703.564.896	28,14	
		1774.EBA.962 Layanan Umum	3.000.000.000	1.418.522.790	47,28	
		1774.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	2.000.000.000	989.225.871	49,46	
		1774.EBA.994 Layanan Perkantoran	41.971.606.000	21.721.315.202	51,75	2.098.774.182
		1774.EBB.951 Layanan Sarana Internal	2.268.817.000	944.205.500	41,62	
		1774.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	3.731.183.000	83.927.000	2,25	781.015.836
		1774.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7.140.310.000	2.812.790.163	39,39	
		1774.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.000.000.000	704.752.582	35,24	
		1774.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	17.500.000.000	5.681.834.769	32,47	
		1774.FAD.012 Layanan Perencanaan Satker Daerah	5.455.756.000	2.265.703.273	41,53	
		1774.FAD.013 Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah	31.980.844.000	11.368.130.692	35,55	
V	5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura		85.211.444.000	20.743.999.728	24,34	10.103.927.651
		5886.AEA.021 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	7.460.566.000	2.967.848.477	39,78	
		5886.AFA.022 Peraturan/Norma/Pedoman	1.047.459.000	512.013.558	48,88	
		5886.CAI.010 Kawasan Pisang	0	0	0,00	
		5886.CAI.016 Kawasan Jeruk	4.300.500.000	937.870.230	21,81	1.897.683.670
		5886.CAI.017 Kawasan Buah Lain	31.522.919.000	264.376.596	0,84	180.000.000
		5886.CAI.019 Kawasan Florikultura Lain	5.060.000.000	1.907.029.540	37,69	
		5886.CBK.010 Prasarana Budidaya Buah dan Florikultura	1.050.000.000	705.750.000	67,21	
		5886.RAI.012 Kawasan Durian	5.850.000.000	1.186.379.660	20,28	1.620.935.450
		5886.RAI.013 Kawasan Mangga	3.250.000.000	1.035.026.850	31,85	1.227.096.500
		5886.RAI.014 Kawasan Kelengkeng	8.550.000.000	4.498.420.182	52,61	1.953.559.000
		5886.RAI.015 Kawasan Alpukat	5.850.000.000	2.262.227.880	38,67	1.989.404.031
		5886.RAI.016 Kawasan Manggis	4.550.000.000	1.760.526.590	38,69	1.235.249.000
		5886.RAI.018 Kawasan Krisan	3.780.000.000	1.573.980.165	41,64	
5886.RAI.019 Kawasan Anggrek	2.940.000.000	1.132.550.000	38,52			
VI	5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura		145.005.200.000	20.144.465.094	13,89	14.359.510.494
		5887.ADA.010 Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	2.026.085.000	319.647.955	15,78	
		5887.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	7.773.843.000	2.951.069.786	37,96	
		5887.AEH.020 Promosi Produk Hortikultura	12.746.706.000	1.042.045.592	8,18	46.830.000
		5887.AFA.021 Peraturan/Norma/Pedoman	331.607.000	50.034.500	15,09	
		5887.BMA.030 Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	2.870.000.000	540.986.342	18,85	
		5887.CAG.010 Sarana Pemasaran	4.480.319.000	244.717.790	5,46	
		5887.PDC.010 Sertifikasi Produk Hortikultura	1.980.216.000	728.292.312	36,78	
		5887.QDD.021 Penerapan GAP	1.650.000.000	397.165.000	24,07	
		5887.QDD.022 Penerapan GHP	1.433.725.000	38.681.000	2,70	
		5887.RAG.010 Sarana Pascapanen Hortikultura	46.330.397.000	1.994.218.660	4,30	8.684.226.194
		5887.RAG.011 Sarana Pengolahan Hortikultura	16.465.000.000	859.152.448	5,22	3.420.344.300
		5887.RAI.010 Horticulture Development of Dryland Areas Project	5.000.000.000	0	0,00	
		5887.RBK.010 Prasarana Pascapanen Hortikultura	38.708.191.000	10.958.560.092	28,31	664.900.000
		5887.RBK.011 Prasarana Pengolahan Hortikultura	3.209.111.000	19.893.617	0,62	1.543.210.000
		Total			1.004.155.508.000	218.999.762.640

Sumber: OMSPAN (30 Juni 2023) diolah

D. Capaian Realisasi Keuangan Per Satker Lingkup Ditjen Hortikultura

1. Satker Dekonsentrasi

Terdapat 34 Satker Dekonsentrasi yang mendapat alokasi APBN Hortikultura TA. 2023 dengan total anggaran Rp.136.745.101.000,00 dengan realisasi Satker Dekonsentrasi sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp.39.805.636.000,00 (29,11%) dengan nilai outstanding kontrak sebesar Rp.13.816.062.000,00. Dari 34 Satker Dekonsentrasi, 4 (empat) Satker telah mencapai target realisasi 40%, 6 (enam) Satker realisasi antara 33-39%, 14 Satker realisasi antara 20-29%, 7 (tujuh) Satker realisasi masih berkisar 11-18%, dan 3 (tiga) Satker realisasinya masih sangat rendah < 10%. Ranking Realisasi Satker Dekonsentrasi ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Ranking Realisasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Lingkup Ditjen Hortikultura s.d. 30 Juni 2023

No	Kode Nama Satker	Pagu (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Outstanding Kontrak (Rp)
			Realisasi SP2D (Rp)	% Realisasi SP2D	
1	109005 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	4.052.706.000	2.866.240.860	70,72	-
2	129000 DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	5.879.176.000	3.777.006.716	64,24	159.264.000
3	339156 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	1.991.358.000	882.260.000	44,30	-
4	089009 DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	5.964.102.000	2.403.948.066	40,31	478.588.274
5	039012 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	12.459.339.000	4.957.713.000	39,79	866.278.000
6	269000 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	1.696.290.000	633.552.450	37,35	159.562.500
7	189016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	3.260.832.000	1.146.857.310	35,17	346.750.000
8	179021 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	2.552.864.000	884.768.500	34,66	39.860.100
9	229027 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	3.606.328.000	1.234.665.438	34,24	302.813.300
10	159000 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	4.264.785.000	1.438.876.370	33,74	1.233.870.000
11	289034 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	2.246.316.000	670.570.000	29,85	-
12	169025 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2.860.431.000	830.149.000	29,02	682.000.000
13	219000 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	2.047.662.000	582.520.000	28,45	-
14	329026 DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	827.283.000	230.959.050	27,92	-
15	029027 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	8.075.003.000	2.208.409.921	27,35	-
16	199026 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	6.898.932.000	1.882.959.886	27,29	485.800.000
17	239009 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	4.280.471.000	1.155.132.250	26,99	670.000.000
18	309032 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.345.364.000	357.080.750	26,54	-
19	249030 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	4.222.387.000	1.084.046.221	25,67	471.520.000
20	209065 DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	3.746.417.000	922.382.000	24,62	570.650.000
21	059000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	8.659.298.000	2.123.700.658	24,53	209.817.750
22	417673 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	760.696.000	166.983.684	21,95	-
23	069077 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	5.451.568.000	1.170.249.400	21,47	2.438.600.000
24	079025 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	9.574.986.000	1.936.345.350	20,22	-
25	299005 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	2.747.382.000	520.000.000	18,93	-
26	099033 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	3.972.871.000	743.166.856	18,71	1.338.240.648
27	319002 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	2.661.144.000	496.707.800	18,67	823.800.000
28	139030 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	3.196.773.000	531.282.100	16,62	158.800.000
29	340056 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	2.753.988.000	405.988.200	14,74	793.491.408
30	119000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	4.236.468.000	616.352.748	14,55	-
31	149000 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2.936.025.000	345.304.529	11,76	513.610.750
32	019031 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	934.918.000	90.040.860	9,63	-
33	049025 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	4.454.750.000	381.142.800	8,56	1.072.746.025
34	259018 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	2.126.188.000	128.273.600	6,03	-
	JUMLAH	136.745.101.000	39.805.636.373	29,11	13.816.062.755

Sumber: OMSPAN (30 Juni 2023) diolah

2. Satker Tugas Pembantuan

Terdapat 39 Satker Tugas Pembantuan yang terdiri dari 31 Satker Tugas Pembantuan Provinsi dan 8 (delapan) Satker Tugas Pembantuan Kabupaten (TP Mandiri) dengan total anggaran Rp.120.330.874.000,00, dengan realisasi Satker Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Hortikultura TA. 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 baru mencapai sebesar Rp.31.366.396.413,00 (26,07%) dengan nilai outstanding kontrak sebesar Rp.20.581.911.402,00. Dari 39 Satker Tugas Pembantuan, realisasi Triwulan Kedua paling tinggi sudah mencapai 82,15%, yaitu Satker Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Ranking Realisasi Satker Tugas Pembantuan ditampilkan pada pada Tabel 6.

Tabel 6. Ranking Realisasi Anggaran Satker Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Hortikultura s.d. 30 Juni 2023

No	Kode Nama Satker	Pagu (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Outstanding Kontrak (Rp)
			Realisasi SP2D (Rp)	% Realisasi SP2D	
1	099315 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	3.325.000.000	2.731.586.462	82,15	-
2	269057 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KAB KEPAHANG	1.405.000.000	947.968.488	67,47	265.320.321
3	192135 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ENREKANG	1.080.000.000	681.639.420	63,11	69.000.000
4	340142 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	3.000.000.000	1.754.057.557	58,47	533.754.900
5	030649 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BATANG	1.290.000.000	743.862.500	57,66	55.498.000
6	129113 DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	4.816.210.000	2.675.670.546	55,56	266.410.000
7	059056 DINAS KEHUTANAN PERTANIAN DAN URUSAN KETAHANAN PANGAN KAB. BANYUWANGI	1.310.000.000	712.647.600	54,40	-
8	309901 DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.220.500.000	624.440.000	51,16	-
9	159108 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	4.019.300.000	2.015.603.121	50,15	474.934.670
10	109905 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	2.686.000.000	1.258.312.643	46,85	116.834.000
11	419022 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINJAI	665.000.000	288.890.714	43,44	59.967.500
12	219091 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	2.780.000.000	1.151.599.000	41,42	1.118.804.500
13	039152 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	5.245.000.000	2.020.442.270	38,52	138.580.000
14	089131 DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	5.631.000.000	2.099.281.169	37,28	2.175.090.241
15	209108 DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	4.015.000.000	1.482.048.000	36,91	881.845.000
16	149115 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2.785.000.000	977.591.950	35,10	-
17	229100 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	2.407.000.000	828.724.664	34,43	-
18	319089 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	3.305.000.000	1.005.317.800	30,42	1.043.443.000
19	029036 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. CIANJUR	2.550.000.000	747.110.000	29,30	-
20	249159 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	4.936.444.000	985.728.940	19,97	1.621.844.400
21	059179 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	7.175.000.000	1.292.218.251	18,01	178.944.000
22	189916 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.855.000.000	494.435.000	17,32	1.198.267.450
23	069133 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	3.198.000.000	508.621.910	15,90	944.939.200
24	139126 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	4.905.000.000	689.676.000	14,06	1.694.150.000
25	229049 DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABARAN	939.000.000	126.308.721	13,45	132.360.000
26	029160 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	5.560.000.000	537.412.507	9,67	88.004.000
27	199092 DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG	910.000.000	81.764.335	8,99	300.750.000
28	280151 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	2.655.000.000	213.960.000	8,06	460.000.000
29	049088 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	2.750.000.000	200.800.500	7,30	242.600.000
30	320088 DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	790.000.000	49.104.450	6,22	-
31	259098 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	705.000.000	43.290.000	6,14	-
32	299381 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	2.305.000.000	140.000.000	6,07	-
33	199126 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	6.394.500.000	338.021.900	5,29	2.240.865.000
34	119130 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	3.819.000.000	193.692.096	5,07	985.185.000
35	079125 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	6.103.920.000	298.107.399	4,88	2.147.700.720
36	239127 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2.725.000.000	128.491.500	4,72	-
37	179104 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	2.095.000.000	95.910.000	4,58	212.440.000
38	417674 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.900.000.000	65.683.000	3,46	-
39	169113 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	4.075.000.000	136.376.000	3,35	934.379.500
	JUMLAH	120.330.874.000	31.366.396.413	26,07	20.581.911.402

Sumber: OMSPAN (30 Juni 2023) diolah

3. Satker Ditjen Hortikultura (Satker Pusat)

Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi Satker Ditjen Hortikultura (Satker Pusat) baru mencapai Rp.147.827.729.854,00 (19,79%) dengan outstanding kontrak sebesar Rp.57.058.006.611,00. Realisasi tertinggi dicapai pada Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura (42,39%), sedangkan kegiatan yang realisasinya paling rendah adalah Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (11,80%). Realisasi Satker Ditjen Hortikultura (Satker Pusat) Per Kegiatan s.d. 30 Juni 2023 ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Realisasi Satker Ditjen Hortikultura (Satker Pusat) Per Kegiatan s.d. 30 Juni 2023

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Outstanding Kontrak (Rp)
			SP2D (Rp)	% Realisasi SP2D	
1	1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	314.191.107.000	49.819.003.572	15,86	31.917.057.040
2	1773 Perlindungan Hortikultura	23.775.391.000	3.393.217.300	14,27	139.510.000
3	1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	84.611.916.000	35.865.725.573	42,39	2.879.790.018
4	4581 Perbenihan Hortikultura	174.781.919.000	32.682.694.741	18,70	9.059.948.800
5	5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	58.722.944.000	15.331.868.048	26,11	2.258.320.000
6	5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	90.996.256.000	10.735.220.620	11,80	10.803.380.753
	JUMLAH	747.079.533.000	147.827.729.854	19,79	57.058.006.611

Sumber: OMSPAN (30 Juni 2023) diolah

III. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN II TA. 2023

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang dilaporkan ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2023 untuk mencapai 7 (tujuh) Sasaran Program yaitu: 1). Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri; 2). Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan; 3). Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas; 4). Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian; 5). Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian; 6). Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, Dan Berorientasi Pada Layanan Prima; 7). Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura pada Triwulan I selengkapnya disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Ditjen Hortikultura s.d. Triwulan 2

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1.1	Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis (%)	1,93	-49,99	Data dari SPH <i>Online</i> baru s.d. 1 Agustus 2023, sehingga belum bisa dibandingkan dengan target, karena baru dapat dihitung setelah sampai 1 tahun/ periode.
		1.2	Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan (%)	3,88	-58,75	Data dari SPH <i>Online</i> baru s.d. 1 Agustus 2023, sehingga belum bisa dibandingkan dengan target, karena baru dapat dihitung setelah sampai 1 tahun/ periode.

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
2.	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan	2.1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura (%)	92,5	-	Belum dilakukan pengukuran, survei baru akan dilakukan di akhir tahun anggaran.
3.	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas	3.1	Rasio Serangan OPT yang Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura (%)	95	99,29	Data sampai 30 Juni 2023.
		3.2	Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI (%)	50	82,40	Data sampai 3 Juli 2023.
4.	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	4.1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura (%)	85	-	Belum dilakukan pengukuran, survei baru akan dilakukan di akhir tahun anggaran.
5.	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5.1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Hortikultura (%)	3	-59,44	Data baru s.d. Mei 2023, sehingga belum bisa dibandingkan dengan target, karena baru dapat dihitung setelah sampai 1 tahun/ periode.

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
6.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, Dan Berorientasi Pada Layanan Prima	6.1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura (Nilai)	32,07	33,78	Nilai PMPRB Tahun 2023 diambil dari Nilai PMPRB Tahun 2022. Hal ini disebabkan PMPRB Tahun 2023 telah dihentikan sesuai surat dari Kementerian PAN RB.
7.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	7.1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura (Nilai)	82	41,6	Nilai sementara, sehingga belum bisa dibandingkan dengan target, baru dilakukan penilaian di akhir tahun anggaran.

Sumber: Ditjen Hortikultura diolah

Pada umumnya pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan di akhir tahun anggaran, yaitu pada saat penyusunan Laporan Kinerja (Lakin), hal ini dikarenakan target kinerja yang ada merupakan target kinerja untuk 1 (satu) tahun anggaran. Sehingga menyebabkan beberapa indikator kinerja belum tersedia datanya atau belum bisa dilakukan pengukuran, seperti indikator kinerja peningkatan produksi hortikultura strategis dan peningkatan produksi hortikultura unggulan dimana nilainya masih negatif. Hal ini dikarenakan data produksi dari SPH *online* masih dalam proses (data belum seluruhnya masuk), akibat pertanaman belum semua menghasilkan dan tertanam, sehingga perhitungan capaian indikator kinerja menjadi kurang akurat dan menyebabkan angka negatif.

Untuk indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana produksi dan tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan belum tersedia datanya, karena fasilitasi bantuan baik sarana produksi dan sarana pasca panen/pengolahan belum seluruhnya tersalurkan dan dimanfaatkan, sehingga survei baru dapat dilakukan di akhir tahun anggaran. Lebih lanjut, hal ini juga berlaku dalam pengukuran nilai kinerja anggaran (NKA), dimana penilaian baru dilakukan di akhir tahun anggaran.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator kinerja yang telah mencapai targetnya, seperti indikator kinerja rasio serangan OPT yang ditangani dan rasio luas area yang mendapat penanganan DPI. Sedangkan, untuk indikator kinerja nilai PMPRB menggunakan nilai capaian tahun 2022, hal ini disebabkan PMPRB tahun 2023 tidak lagi dilakukan (dihentikan), sesuai arahan dari Kementerian PAN RB selaku penanggung jawab Pusat/Nasional PMPRB, melalui surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB, nomor B/01/RB.06/2023.

Selanjutnya, untuk mengetahui kinerja capaian produksi hortikultura strategis, jika dibandingkan capaian per triwulannya antara periode Triwulan II 2023 dengan periode Triwulan II 2022, dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Produksi Hortikultura Komoditas Strategis Triwulan II 2023 dan Triwulan II 2022

No.	Komoditas	Produksi (Ton)	
		TW II 2023	TW II 2022
1	Bawang Merah	975.531,26	990.079,65
2	Bawang Putih	17.031,00	16.077,79
3	Cabai Besar	740.338,62	751.597,50
4	Cabai Rawit	784.082,91	793.885,68
Total		2.516.983,79	2.551.640,63

Sumber: SPH *Online* (1 Agustus 2023) diolah

Berdasarkan data pada tabel 9 di atas, terlihat bahwa total produksi komoditas strategis pada triwulan dua (TW II) tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan total produksi komoditas strategis pada triwulan dua (TW II) tahun 2022. Dimana secara rinci untuk pencapaian produksi bawang putih masih lebih tinggi di TW II tahun 2023 dibandingkan TW II tahun 2022, sebaliknya untuk produksi bawang merah dan aneka cabai (cabai besar dan cabai rawit) pencapaian produksi di TW II tahun 2023 lebih rendah dibandingkan TW II tahun 2022.

IV. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan


Beberapa permasalahan yang masih terjadi pada triwulan II antara lain:

1. Adanya *refocusing* anggaran, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan menjadi tertunda dan perlu penyesuaian pada satuan biaya untuk beberapa kegiatan, seperti kegiatan fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura.
2. Masih adanya keterlambatan dan kekurangan dokumen CPCL dari daerah atau Komisi IV DPR RI (kegiatan aspirasi), yang disebabkan oleh masalah administrasi dan teknis.
3. Masih terjadi keterlambatan bantuan benih pada beberapa kegiatan, seperti kegiatan kawasan aneka cabai, kawasan bawang bombai, dan kawasan florikultura (Melati, *Dracaena*, dan Sedap Malam).
4. Masih ditemukan ketidaksesuaian jadwal tanam dengan waktu tibanya bantuan.
5. Adanya beberapa daerah belum mampu memenuhi persyaratan luas minimal kampung yaitu 10 (sepuluh) hektar per desa.
6. Beberapa varietas cabai yang diminta daerah tidak tersedia di *e-catalog* dan terbatasnya ketersediaan benih cabai untuk varietas tertentu di penyedia, sehingga perlu konfirmasi ulang ke kelompok penerima manfaat.
7. Adanya pengalihan kelompok penerima manfaat untuk kegiatan fasilitasi sarana pemasaran, dari semula Pasar Tani menjadi ke UMKM dan *Champion*, sehingga berakibat pada tertundanya pelaksanaan bantuan.
8. Anggaran verifikasi CPCL/pendampingan/pemantauan tidak mencukupi, khususnya untuk kegiatan P2L di daerah kepulauan dan perbatasan, serta kegiatan kawasan florikultura. Sehingga kegiatan verifikasi/pendampingan/pemantauan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan kurang intensif oleh Dinas Pertanian di daerah.
9. Adanya kendala dalam kegiatan Sekolah Lapang *Good Handling Practices* (SL GHP), yaitu dalam hal administrasi, SDM yang terbatas dalam pelaksanaan SL GHP, dan lokasi CPCL yang cukup jauh sedangkan anggaran terbatas.
10. Adanya keterbatasan jumlah teknisi yang dapat melakukan *running test* alat pada kegiatan fasilitasi sarana pengolahan, sehingga berakibat pada keterlambatan dalam pengadaannya.
11. Masih ditemukan BAST yang belum dilengkapi foto *open camera* dan pengiriman dokumen BAST dari kelompok penerima ke penyedia juga cukup lama.
12. Kegiatan *Smart Green House* masih dalam tahap persiapan, hal ini dikarenakan anggaran baru tersedia/masuk dalam POK Revisi ke-7 pada bulan Mei 2023.
13. Kegiatan HDDAP belum dapat dilaksanakan, karena anggaran masih di blokir, akibat belum adanya *Loan Agreement* antara ADB dan IFAD dan *Loan Effective*.

B. Tindak Lanjut

Adapun tindak lanjut yang dilakukan meliputi:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI secara intensif untuk percepatan pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan koordinasi dengan penyedia secara intensif untuk ketersediaan barang dan percepatan *dropping* bantuan.

- 
3. Melaksanakan pertemuan dan koordinasi yang intensif antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan baik melalui *video conference*, konfirmasi melalui telepon atau whatsapp, dan pendampingan langsung ke daerah.
 4. Melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pertanian, untuk melengkapi dokumen CPCL agar dapat membentuk kampung dengan luas minimal 10 (sepuluh) hektar per desa.
 5. Berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, agar segera mengajukan CPCL yang memenuhi persyaratan dan sanggup melaksanakan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis.
 6. Relokasi bantuan ke daerah lain apabila tidak ada CPCL yang memenuhi persyaratan di daerah sebelumnya.
 7. Mendorong Dinas Pertanian untuk mengawal secara aktif proses pemberian bantuan, mulai dari identifikasi CPCL hingga proses *dropping* dan monitoring pertanaman agar hasil produksi optimal.
 8. Melakukan sosialisasi secara *online* untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan P2L.
 9. Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan di daerah.
 10. Koordinasi dengan Direktorat Perbenihan Hortikultura untuk percepatan penyediaan benih di beberapa kegiatan fasilitasi bantuan lingkup Ditjen Hortikultura.
 11. Melakukan koordinasi dengan petugas di daerah secara terus menerus, berkaitan dengan progres kegiatan, kendala yang dialami, rencana kegiatan, dan penarikan anggaran.
 12. Melakukan pengawalan dalam penyusunan rancangan desain (jika berbentuk bangunan) atau detail spesifikasi barang (jika berbentuk alat-alat).
 13. Bersurat kepada penerima bantuan sarana pemasaran agar segera mengirimkan jenis sarana pemasaran yang dibutuhkan.
 14. Koordinasi dengan Dinas Pertanian dan penyedia secara intensif untuk percepatan proses administrasi dokumen BAST dan penginputan BAST BANPEM.
 15. Melakukan pengawalan dan percepatan penyelesaian *Loan Agreement* dan *Loan Effective*.

V. PENUTUP

Laporan Triwulan II Direktorat Jenderal Hortikultura ini merupakan perwujudan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Berbagai upaya telah dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya sasaran dan target kinerja hortikultura pada triwulan II. Direktorat Jenderal Hortikultura sampai Triwulan II ini, dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja yang ada, 3 (tiga) diantaranya telah mencapai targetnya, yaitu indikator kinerja rasio serangan OPT yang ditangani, indikator kinerja rasio luas area yang mendapat penanganan DPI, dan indikator kinerja nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan, baik di pusat dan daerah. Oleh karena itu, kerja sama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi menjadi kunci agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional, dan kesejahteraan petani hortikultura.